

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan nasional yang mempunyai peranan besar dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Pembangunan kesehatan yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditandai dengan peningkatan kesehatan penduduk (Putri, 2016). Menurut organisasi kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*) sehat merupakan suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental dan sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. *Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of diseases or infirmity*. Hal ini secara analogi kesehatan, dapat didefinisikan bukan hanya sekedar bebas dari gangguan tetapi lebih kepada perasaan sehat, sejahtera dan bahagia (*well-being*), ada keserasian antara pikiran, perasaan, perilaku, dapat merasakan kebahagiaan dalam sebagian besar kehidupannya serta mampu mengatasi tantangan hidup sehari-hari. Sehat itu sendiri terdiri dari 4 komponen utama yaitu sehat jasmani, sehat mental, kesejahteraan sosial dan sehat spiritual. Jika salah satu komponen tidak terpenuhi maka dapat dikatakan seseorang tersebut dalam keadaan tidak sehat (WHO, 2013). Salah satu ancaman bidang kesehatan yang berpotensi menghambat pencapaian SDGs adalah adanya praktik prostitusi baik yang dilakukan melalui cara konvensional atau dilakukan menggunakan media teknologi dan informasi atau lebih dikenal dengan istilah prostitusi online.

Sebuah riset lembaga peneliti aktivitas pasar gelap, Havocscope, menghimpun data 12 negara teratas yang warganya paling banyak berbelanja prostitusi dalam hitungan per tahun. Indonesia masuk di urutan ke 12 dengan jumlah pengeluaran belanja prostitusi senilai USD 2,25 miliar atau sekitar 30 triliun per tahun. Di Indonesia, praktik prostitusi dilakukan secara gelap. Meski dianggap sebagai kejahatan moral, aktivitas prostitusi di Indonesia tersebar luas. UNICEF memperkirakan, 30% PSK (Pekerja Seks Komersial) di Indonesia berusia di bawah 18 tahun. Akhir-akhir ini bahkan marak pemberitaan tentang artis-artis Indonesia yang juga bekerja di sektor prostitusi (Koentjoro, 2016). Penutupan lokalisasi di Kota Mojokerto merupakan *public policy* yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mojokerto. *Public policy* ini mengacu pada target kinerja yang ingin dicapai oleh Kementerian Sosial yaitu Indonesia bebas lokalisasi prostitusi pada 2019. Beberapa tujuan yang melandasi penutupan lokalisasi prostitusi adalah untuk menurunkan angka kejadian HIV AIDS, memberantas praktik premanisme, menurunkan angka kejadian kekerasan seksual (*sex abuse*) serta sebagai bentuk jaminan dari pemerintah terkait pemenuhan hak asasi manusia (*human right*) baik pada PSK (Pekerja Seks Komersial) maupun masyarakat di sekitar lokalisasi prostitusi.

Sehat merupakan kondisi dimana seseorang memiliki kondisi fisik yang optimal, kondisi mental yang maksimal, memiliki jaminan terhadap kondisi sosial serta aman dalam hal finansial. Saat salah satu indikator tidak terpenuhi maka seseorang tidak dapat dikatakan sehat. *Public policy* yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pembubaran lokalisasi prostitusi tidak memberikan jaminan bahwa praktik prostitusi akan berhenti. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa praktik

prostitusi yang selama ini dilakukan di suatu wilayah / lokalisasi berganti lokasi serta model yang digunakan. Dewasa ini yang marak diperdebatkan adalah praktik prostitusi online. Terkuaknya praktik prostitusi yang dilakukan dikalangan artis seolah-olah menjadi suatu titik balik untuk mengungkap praktik prostitusi pasca deklarasi penutupan lokalisasi yang ada di masyarakat (Azizi, 2015). Pasca deklarasi pembubaran lokalisasi balongcangkring Kota Mojokerto, masih ditemukan adanya praktik prostitusi yang dilakukan oleh mantan PSK lokalisasi balongcangkring Kota Mojokerto. Hasil pengumpulan data awal yang dilakukan peneliti kepada mantan PSK balongcangkring Kota Mojokerto ditemukan fakta bahwa mereka masih tetap menjalankan kegiatan prostitusi. Namun metode yang digunakan sudah berbeda dengan yang mereka lakukan selama ini. Mereka sekarang menggunakan teknologi informasi yang ada untuk melakukan praktik prostitusi ini. Sebagai tempat kegiatan, mereka memilih untuk bertransaksi di cafe, tempat karaoke ataupun hotel yang berada di wilayah Mojokerto.

Prostitusi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat dengan kondisi perekonomian yang kurang, namun juga dilakukan oleh masyarakat dari kalangan perekonomian yang memadai. Alasan klasik perekonomian serta sulitnya mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan tidak lagi menjadi suatu alasan utama yang melandasi seseorang melakukan praktik prostitusi. Namun masih ada latar belakang lain yang mendasari seseorang untuk melakukan praktik prostitusi. Temuan terbaru yang ada di Indonesia terkait kasus prostitusi juga dilakukan oleh kalangan artis / masyarakat dengan perekonomian menengah keatas. Hal ini menunjukkan bahwa lokalisasi prostitusi yang ada di Indonesia sudah gencar untuk dilakukan penutupan namun hal ini tidak memberikan

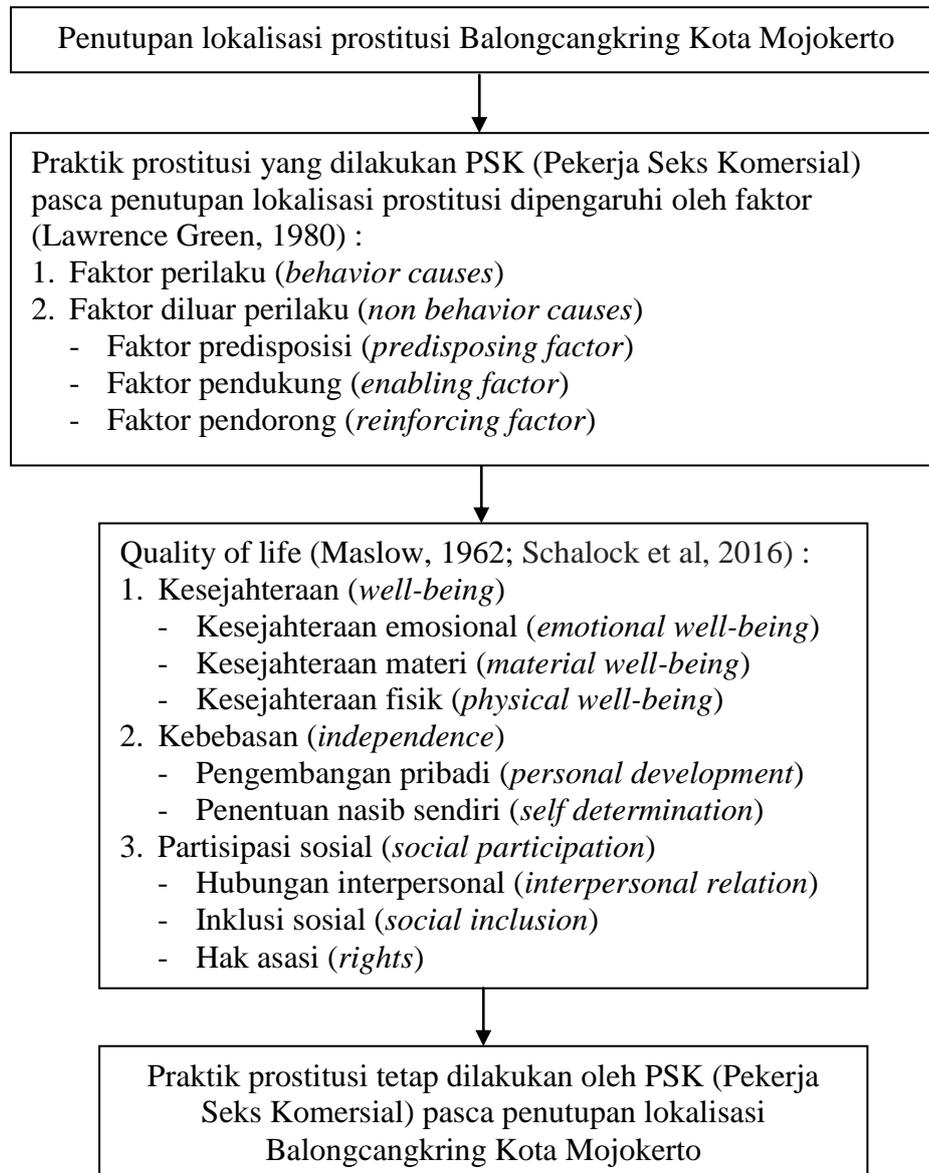
jaminan bahwa praktik prostitusi akan berhenti. Berdasarkan data dan permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu kajian ilmiah terkait perilaku prostitusi yang dilakukan pasca deklarasi penutupan lokalisasi Balongcangkring Kota Mojokerto. Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengembangkan program kerja terkait dalam upaya menekan angka penyebaran penyakit menular seksual dan mensukseskan program Jawa Timur bebas prostitusi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori kualitas hidup (*quality of life*) yang dicetuskan oleh Abraham Maslow (1962) dalam bukunya yang berjudul *Towards a Psychology of Being*. Selanjutnya teori ini dikembangkan oleh Schalock et al (2012) dan digunakan untuk melakukan penelitian dibidang sosial. Berdasarkan teori ini, praktik prostitusi yang dilakukan oleh PSK (Pekerja Seks Komersial) pasca penutupan lokalisasi prostitusi ditentukan oleh 3 faktor utama yaitu kebebasan (*independence*) (Sanda et al, 2008; Hermawanti dan Widjanarko, 2011), partisipasi sosial (*social participation*) (Schwimmer et al, 2003; King et al, 2013) dan kesejahteraan (*well-being*) (Rubin dan Peyrot, 1999; Schrag et al, 2000; Diener et al, 2009; Pratiwi, 2012). Berdasarkan teori kualitas hidup (*quality of life*) maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi domain kualitas hidup (*quality of life*) yang dimiliki oleh PSK.

1.2. Kajian Masalah

Kajian masalah pada penelitian ini berdasarkan data dan kajian teori disajikan pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.1. Kajian masalah penelitian



Penutupan lokalisasi balongcangkring Kota Mojokerto merupakan salah satu program yang menjadi agenda pemerintah Jawa Timur. Program Nasional Indonesia bebas prostitusi pada 2019 menjadi landasan utama penutupan berbagai lokalisasi yang ada di wilayah Jawa Timur. Dilaporkan hingga tahun 2018, Kementerian Sosial telah melakukan penutupan 118 lokalisasi di seluruh Indonesia. Untuk wilayah Jawa Timur, telah dilakukan penutupan lokalisasi prostitusi sebanyak 53 lokalisasi termasuk lokalisasi Dolly - Surabaya yang

merupakan salah satu lokalisasi terbesar di ASIA dan lokalisasi Balongcangkring Kota Mojokerto.

Penutupan lokalisasi balongcangkring Kota Mojokerto tidak memberikan jaminan bahwa praktik prostitusi akan berhenti. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa praktik prostitusi masih marak terjadi di wilayah Kota dan Kabupaten Mojokerto pasca deklarasi penutupan lokalisasi. Salah satu alasan sebagai pembenaran masih terjadinya praktik prostitusi adalah kurangnya kualitas hidup (*quality of life*) yang dimiliki oleh para PSK. kualitas hidup memiliki tiga domain utama yaitu kesejahteraan (*well-being*), kebebasan (*independence*) dan partisipasi sosial (*social participation*). Penutupan lokalisasi balongcangkring yang dilakukan oleh pemerintah Kota Mojokerto selain untuk memastikan terlaksananya program nasional Indonesia bebas prostitusi pada tahun 2019, juga dimaksudkan agar setiap para PSK mampu hidup lebih layak. Namun kurangnya kualitas hidup yang dirasakan oleh para PSK menjadikan mereka masih tetap melakukan praktik prostitusi. Kualitas hidup merupakan kebutuhan yang harus terpenuhi oleh setiap individu untuk bisa hidup sehat. Kesenjangan yang terjadi pada domain pembentuk kualitas hidup yang dimiliki oleh individu akan memicu terjadinya penurunan kualitas hidup yang pada akhirnya akan berdampak pada masing-masing pribadi individu. Seorang PSK yang tidak merasakan adanya kualitas hidup yang optimal akibat penutupan lokalisasi, akan kembali melakukan praktik prostitusi guna memenuhi kesenjangan domain pembentuk kualitas hidup

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan kajian masalah yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah kualitas hidup (*quality of life*) yang dimiliki oleh PSK (Pekerja Seks Komersial) pasca penutupan lokalisasi prostitusi Balongcangkring Kota Mojokerto ?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Memahami kualitas hidup (*quality of life*) yang dimiliki oleh PSK (Pekerja Seks Komersial) pasca penutupan lokalisasi prostitusi Balongcangkring Kota Mojokerto

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi karakteristik Pekerja Seks Komersial di Lokalisasi Balongcangkring Kota Mojokerto
2. Menganalisa kesejahteraan (*well-being*) sebagai domain dari kualitas hidup (*quality of life*) pada PSK (Pekerja Seks Komersial) pasca penutupan lokalisasi prostitusi Balongcangkring Kota Mojokerto
3. Menganalisa kebebasan (*independence*) sebagai domain dari kualitas hidup (*quality of life*) pada PSK (Pekerja Seks Komersial) pasca penutupan lokalisasi prostitusi Balongcangkring Kota Mojokerto
4. Menganalisa partisipasi sosial (*social participation*) sebagai domain dari kualitas hidup (*quality of life*) pada PSK (Pekerja Seks Komersial) pasca penutupan lokalisasi prostitusi Balongcangkring Kota Mojokerto

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai salah satu informasi dan sumber literatur dalam melakukan kajian terkait kualitas hidup (*quality of life*) terkait dengan perilaku pada PSK (Pekerja Seks Komersial) dan praktik prostitusi

1.5.2. Manfaat Praktik

1. Sebagai kajian bagi penentu program untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program nasional Indonesia bebas prostitusi
2. Sebagai informasi bagi mantan PSK (Pekerja Seks Komersial) untuk dapat memahami secara utuh terkait kualitas hidup (*quality of life*) yang dimiliki dan kaitannya dengan praktik prostitusi yang dilakukan guna pencapaian kualitas hidup (*quality of life*) yang optimal
3. Hasil penelitian yang dilakukan dapat dijadikan sebagai informasi mengenai praktik prostitusi yang terjadi dilapangan sehingga penyusunan program dan pengembangan kegiatan dalam upaya pemberantasan prostitusi dapat tercapai dengan maksimal